



Pandangan Tiga Mahasiswa Calon Pendidik Terhadap Isu *Child Grooming* di Sekolah

Rini Krisna Dewi

Universitas Negeri Jakarta

Alamat: Jl. Rawamangun Muka Raya No. 11, RT 11/RW14, Rawamangun, Pulo Gadung,
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220.

Korespondensi penulis: heyrinikrisna@gmail.com

Abstrak. *Child Grooming in schools is a serious issue that threatens the safety and well-being of students. It often involves teachers or educators manipulating emotional relationships to exploit children sexually or in other forms of violence. This study aims to analyze the views of prospective teacher students regarding the issue of Child Grooming and the factors that contribute to its occurrence in the school environment. Using a qualitative approach, data was collected through questionnaires on their understanding of grooming, the contributing factors, students' rights, and child protection policies in schools. The findings show that most respondents understand grooming as a manipulative action that can harm students' psychological and emotional well-being. The main factors contributing to grooming include lack of supervision, unhealthy power dynamics between teachers and students, and a lack of education on child protection. This study highlights the importance of ethical training to prevent grooming practices in schools.*

Keywords: *Child Grooming; Child Protection; Policy.*

Abstrak. *Child Grooming* di sekolah adalah masalah serius yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan siswa. Hal ini sering melibatkan guru atau pendidik yang memanipulasi hubungan emosional untuk mengeksploitasi anak secara seksual atau dalam bentuk kekerasan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa calon guru mengenai masalah *Child Grooming* dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut di lingkungan sekolah. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui kuesioner mengenai pemahaman mereka tentang grooming, faktor-faktor penyebabnya, hak siswa, dan kebijakan perlindungan anak di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami grooming sebagai tindakan manipulatif yang dapat merugikan kesejahteraan psikologis dan emosional siswa. Faktor utama yang berkontribusi pada grooming adalah kurangnya pengawasan, dinamika kekuasaan yang tidak sehat antara guru dan siswa, serta kurangnya pendidikan tentang perlindungan anak. Penelitian ini menekankan pentingnya pelatihan etika untuk mencegah praktik grooming di sekolah.

Kata Kunci: *Child Grooming; Perlindungan Anak; Kebijakan.*

PENDAHULUAN

Child Grooming merupakan perilaku yang direncanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan anak di bawah umur (Hawa, dkk. 2020). Grooming merujuk pada proses manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa. Pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, (Mulyana, 2023). Fenomena *Child Grooming* sangatlah berbahaya karena sering kali dilakukan secara perlahan dan tersembunyi, sehingga tidak terdeteksi dengan mudah oleh pihak berwenang atau oleh siswa itu sendiri. Dalam banyak kasus, korban grooming merasa kebingungan dan ketakutan, serta tidak tahu bagaimana melaporkan kejadian tersebut. Hal ini tentu saja menambah kerumitan dalam mencegah dan menangani kasus *Child Grooming* di lingkungan sekolah.

Isu *Child Grooming* di sekolah menjadi perhatian yang semakin mendesak dalam konteks pendidikan di Indonesia. Di dalam dunia pendidikan, pelaku *Child Grooming* dapat dilakukan

oleh guru atau tenaga pendidik. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merilis data kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-Juli 2024. Menurut FSGI, terdapat 15 kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan selama periode tersebut. Mayoritas kekerasan terjadi di jenjang Pendidikan SMP/MTs (40%), SD/MI (33,33%), SMA (13,33%), dan SMK (13,33%). Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo dan Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti melaporkan catatan bahwa kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan, paling tinggi yaitu kekerasan fisik, yang disusul dengan kekerasan seksual oleh guru sebanyak 20%.

Relasi kekuasaan yang ada antara guru dan siswa menjadi faktor utama mengapa grooming bisa terjadi di sekolah. Guru memiliki posisi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan siswa, baik secara akademik maupun emosional. Ketergantungan siswa terhadap guru untuk mendapatkan bimbingan dan perlindungan membuat mereka berada dalam posisi yang rentan untuk dieksploitasi. Tindakan grooming dapat terjadi ketika seorang guru memanfaatkan hubungan ini untuk tujuan pribadi yang merugikan siswa. Sayangnya, di beberapa sekolah, pengawasan terhadap interaksi antara guru dan siswa masih sangat minim, sehingga potensi terjadinya grooming menjadi semakin besar.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman di kalangan pendidik, siswa, dan bahkan orang tua mengenai fenomena grooming itu sendiri. Banyak pihak yang tidak menyadari tanda-tanda perilaku grooming yang dapat terjadi di sekolah, baik itu dalam bentuk perhatian berlebihan, hubungan yang terlalu dekat antara guru dan siswa, ataupun pembatasan ruang gerak siswa yang tidak wajar. Hal ini menjadi hambatan besar dalam mencegah terjadinya eksploitasi seksual, karena korban sering kali tidak tahu bahwa mereka sedang dijebak dalam hubungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai *Child Grooming* kepada semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, terutama calon pendidik yang akan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat.

Peran pendidikan dalam mengatasi *Child Grooming* sangat penting, terutama dalam hal memberikan pemahaman kepada siswa tentang hak-hak mereka. Siswa yang paham tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk merasa aman dan bebas dari pelecehan, akan lebih mampu melindungi diri mereka sendiri dan melaporkan tindakan yang mencurigakan. Pendidikan mengenai hak-hak anak ini harus dimulai sejak dini, tidak hanya di tingkat sekolah menengah, tetapi juga di sekolah dasar. Melalui pengajaran yang tepat, siswa bisa menjadi lebih waspada terhadap potensi ancaman grooming dan tahu ke mana harus mencari bantuan jika merasa terancam atau dirugikan.

Meskipun sebagian besar sekolah di Indonesia telah memiliki kebijakan dan prosedur perlindungan anak, efektivitasnya masih sering dipertanyakan. Banyak kebijakan yang ada tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai, atau bahkan tidak diterapkan secara konsisten. Dalam beberapa kasus, anak-anak merasa tidak ada perlindungan yang cukup dari pihak sekolah, atau mereka takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena merasa tidak akan mendapatkan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, penting bagi setiap sekolah untuk memperbaiki kebijakan yang ada, dengan menambah pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik lainnya mengenai pencegahan dan penanganan kasus grooming, serta menyediakan saluran pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh siswa.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, peran etika profesi pendidikan sangat penting. Etika profesi yang tinggi akan menjadi dasar dalam menciptakan hubungan yang sehat antara guru dan siswa. Guru perlu diajarkan dan dipahami betul mengenai batasan-batasan dalam interaksi dengan siswa untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang. Pelatihan mengenai etika profesi ini tidak hanya penting dalam rangka mencegah tindakan grooming, tetapi

juga untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Oleh karena itu, pendidikan etika profesi harus menjadi bagian integral dalam persiapan calon pendidik.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang *Child Grooming*, faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini, serta pentingnya pemahaman hak-hak siswa, calon pendidik dapat lebih siap untuk mencegah dan menangani kasus grooming dengan lebih efektif. Selain itu, mereka juga akan lebih memahami peran mereka dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan siswa, serta bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman di sekolah. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia dapat menjadi tempat yang lebih aman, di mana siswa dapat belajar dan berkembang tanpa rasa takut akan eksploitasi atau kekerasan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pandangan mahasiswa calon pendidik tentang isu *Child Grooming* di sekolah. Dengan memahami persepsi mereka terhadap fenomena ini, faktor penyebab yang mendasarinya, serta langkah-langkah perlindungan yang dianggap penting, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam pencegahan grooming di sekolah. Penelitian ini juga akan membahas peran etika profesi pendidikan, serta kebijakan yang sudah ada, untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori konflik adalah teori yang menjelaskan mengenai peranan konflik, terutama antara kelompok-kelompok dan kelas-kelas dalam kehidupan masyarakat (Tualeka, 2017). Teori Konflik, yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Max Weber, menyoroti ketimpangan kekuasaan dalam hubungan sosial, yang dapat mengarah pada eksploitasi dan penyalahgunaan posisi. Dalam konteks sekolah, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana ketimpangan kekuasaan antara guru (sebagai pihak yang memiliki otoritas) dan siswa (sebagai pihak yang lebih lemah) dapat dimanfaatkan untuk tujuan grooming. Ketimpangan ini memberikan kesempatan bagi guru untuk memanipulasi dan mengeksploitasi siswa, baik secara emosional maupun seksual, dengan memanfaatkan posisi mereka sebagai figur otoritas.

Dalam hubungan antara guru dan siswa, guru memiliki kekuasaan yang besar, yang sering kali mengarah pada ketergantungan emosional siswa terhadap mereka. Kondisi ini membuka peluang bagi tindakan grooming, di mana guru dapat menggunakan posisi mereka untuk membentuk hubungan yang tidak sehat dengan siswa. Siswa, yang biasanya menganggap guru sebagai pembimbing dan pelindung, dapat dengan mudah dimanipulasi tanpa menyadari bahwa mereka sedang dieksploitasi. Ketimpangan kekuasaan ini, yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai, memungkinkan tindakan grooming berlangsung tanpa terdeteksi.

Selain itu, teori konflik juga menunjukkan bagaimana norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat berperan dalam memperburuk ketimpangan kekuasaan tersebut. Dalam banyak budaya, guru dianggap sebagai figur otoritas yang tidak boleh dipertanyakan, yang membuat siswa merasa terhalang untuk melawan atau melaporkan perilaku yang tidak pantas. Stigma sosial terhadap korban grooming, yang sering kali merasa takut atau malu untuk mengungkapkan pengalaman mereka, juga memperburuk kondisi ini. Oleh karena itu, pemahaman tentang ketimpangan kekuasaan yang terstruktur dalam sistem pendidikan sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik grooming di sekolah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu (Waruwu, 2023). Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data mengenai pandangan mahasiswa calon pendidik terhadap isu *Child Grooming* di sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang disebarakan kepada responden yang terpilih. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di program studi pendidikan, yang memiliki pemahaman dasar tentang isu *Child Grooming*.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari serangkaian pertanyaan terbuka dan tertutup yang dirancang untuk menggali pemahaman responden mengenai *Child Grooming*, faktor-faktor yang mempengaruhinya, pentingnya pemahaman hak-hak siswa, serta efektivitas kebijakan perlindungan anak di sekolah. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner difokuskan pada pemahaman tentang definisi dan ciri-ciri *Child Grooming*, faktor penyebab yang ada di lingkungan sekolah, serta peran calon pendidik dalam mencegah dan menanggulangi masalah ini. Selain itu, kuesioner juga berusaha untuk memahami pandangan responden mengenai pentingnya edukasi perlindungan anak dan etika profesi dalam mengurangi potensi terjadinya *Child Grooming*.

Data yang terkumpul dari kuesioner kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam pemahaman dan persepsi mahasiswa calon pendidik mengenai isu *Child Grooming*. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang pandangan mereka terhadap perlindungan anak di sekolah, serta faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya praktik grooming. Dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data, penelitian ini berupaya memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pentingnya kesadaran dan edukasi bagi calon pendidik dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi siswa.

Tabel 1. Profil Responden

No.	Inisial Nama	Program Studi	Asal Instansi
1.	MDZ	Pendidikan Agama Islam	Universitas Negeri Jakarta
2.	DIR	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	
3.	AA	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	

Sumber : Analisis Penulis (2025)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Tentang *Child Grooming*

Child Grooming adalah fenomena yang mencakup tindakan manipulatif yang dilakukan oleh seseorang, terutama orang dewasa, untuk membangun hubungan emosional dengan anak dengan tujuan untuk eksploitasi seksual atau kekerasan lainnya. Grooming mengacu pada tindakan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan seorang anak dengan tujuan untuk manipulasi, eksploitasi, ataupun pelecehan (Pujayanti & Sulaiman, 2023). Grooming bisa sangat sulit dideteksi, karena pelaku sering kali memanipulasi situasi dengan cara yang sangat hati-hati dan terencana, sehingga korban merasa nyaman dan terlindungi, padahal sebenarnya mereka sedang dijebak untuk tujuan yang sangat merugikan.

Responden pertama mendeskripsikan *Child Grooming* sebagai rencana terstruktur yang dilakukan oleh pelaku secara sistematis untuk mengeksploitasi subjek secara emosional. Hal

ini bisa berujung pada eksploitasi seksual, yang sering kali sulit dideteksi karena korban merasa bahwa hubungan yang dibangun adalah hubungan yang wajar. Dalam banyak kasus, korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi dan digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Tindakan grooming ini sering kali melibatkan penguatan rasa percaya diri korban dengan memberikan perhatian berlebihan atau hadiah yang menarik.

Sementara itu, responden kedua melihat *Child Grooming* sebagai suatu tindakan yang melibatkan pemanfaatan kelemahan korban untuk keuntungan tertentu, yang paling sering ditemukan dalam bentuk kekerasan seksual. Pemahaman ini menunjukkan bahwa grooming bukan hanya tentang membangun hubungan emosional, tetapi juga tentang mengeksploitasi situasi untuk mencapai tujuan yang lebih gelap. Hal ini mencakup penggunaan kekuatan atau manipulasi psikologis untuk meyakinkan korban bahwa perilaku tersebut adalah sesuatu yang normal atau bahkan diinginkan.

Responden ketiga menjelaskan bahwa dalam konteks sekolah, fenomena grooming bisa melibatkan tenaga pendidik, seperti guru atau staf lainnya, yang mencoba untuk membangun hubungan emosional dengan peserta didik. Meskipun tidak semua guru atau pendidik terlibat dalam tindakan grooming, potensi terjadinya fenomena ini sangat besar, terutama karena guru sering kali memiliki otoritas dan pengaruh yang kuat terhadap siswa. Manipulasi emosional yang dilakukan oleh guru atau pendidik bisa sangat berbahaya, terutama ketika hubungan tersebut melampaui batas yang seharusnya.

Secara keseluruhan, fenomena *Child Grooming* di sekolah harus dipahami sebagai suatu tindakan yang sangat terstruktur dan sistematis, dengan tujuan akhir untuk mengeksploitasi anak secara seksual atau psikologis. Penting bagi seluruh komunitas pendidikan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang tanda-tanda grooming, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi semacam ini.

2. **Faktor Penyebab *Child Grooming* di Sekolah**

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *Child Grooming* di sekolah, yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu pelaku tetapi juga dengan kondisi lingkungan dan dinamika sosial yang ada. Responden pertama menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang memiliki pengawasan yang buruk dan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh oknum tertentu dalam sekolah. Dalam situasi seperti ini, pelaku grooming dapat lebih leluasa melakukan tindakan tanpa terdeteksi. Pengawasan yang lemah dan kurangnya prosedur pencegahan membuat siswa menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi.

Faktor lingkungan yang tidak mendukung juga disertai dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pihak tertentu, seperti guru atau staf lain yang memiliki posisi otoritas dalam hubungan mereka dengan siswa. Dalam kondisi seperti ini, pelaku grooming dapat memanfaatkan hubungan kekuasaan tersebut untuk memperoleh kepercayaan siswa dan membangun ketergantungan emosional yang akhirnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan negatif. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dengan melibatkan semua pihak untuk meningkatkan kesadaran tentang fenomena grooming.

Responden kedua menambahkan bahwa faktor individu, seperti trauma emosional yang dialami anak, juga sangat berpengaruh. Anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah atau broken home lebih mungkin untuk mencari perhatian dan kasih sayang di tempat lain, termasuk dari guru atau tenaga pendidik. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku grooming untuk mendekati anak tersebut dan memanipulasi mereka. Trauma emosional yang belum tertangani dengan baik dapat membuat anak lebih rentan terhadap eksploitasi dari pihak luar.

Responden ketiga juga menekankan pentingnya pengawasan yang minim, yang dapat membuka peluang bagi terjadinya grooming. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan, mengingat guru atau pendidik sering kali memiliki akses yang lebih besar terhadap kehidupan emosional siswa. Kurangnya edukasi tentang *Child Grooming* juga menjadi faktor risiko yang signifikan, karena siswa dan bahkan banyak guru tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengenali tanda-tanda grooming, sehingga mereka tidak tahu bagaimana melindungi diri mereka atau melaporkan kejadian yang mencurigakan.

Keseluruhan faktor-faktor ini menunjukkan bahwa *Child Grooming* di sekolah tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor lingkungan, individu, dan kelemahan sistem yang ada di sekolah. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi tentang grooming, baik untuk siswa, guru, maupun seluruh anggota masyarakat pendidikan. Pembentukan lingkungan yang aman dan proaktif adalah langkah awal yang sangat penting dalam pencegahan kasus grooming di sekolah.

3. **Pentingnya Pemahaman Hak-Hak Siswa**

Pemahaman yang baik tentang hak-hak siswa sangat penting dalam mencegah terjadinya *Child Grooming*. Siswa yang memiliki pemahaman yang jelas tentang hak-hak mereka cenderung lebih mampu untuk mengenali perilaku yang tidak wajar dan melaporkannya dengan percaya diri. Responden pertama menekankan bahwa pendidikan mengenai hak-hak anak sangat penting, terutama dalam lingkungan sekolah. Anak-anak yang sadar akan hak mereka untuk merasa aman dan dilindungi dari eksploitasi lebih berkemungkinan untuk berbicara jika mereka merasa terancam.

Membangun kesadaran ini tidak hanya melibatkan pemberian informasi, tetapi juga menciptakan budaya yang mendukung kebebasan berpendapat dan melaporkan kasus yang mencurigakan. Dalam hal ini, seluruh stakeholder pendidikan—termasuk guru, orang tua, dan pengawas pendidikan—harus berkomitmen untuk mendukung siswa dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Tanggung jawab ini tidak hanya terletak pada satu pihak saja, tetapi merupakan upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman.

Responden kedua menambahkan bahwa guru BK, bahkan di tingkat SD, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan emosional kepada siswa. Dengan adanya guru BK, siswa dapat merasa lebih terbuka untuk menceritakan masalah atau kekhawatiran mereka, termasuk jika mereka menjadi korban atau merasa terancam oleh perilaku grooming. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memiliki fasilitas dan profesional yang mendukung kesehatan mental dan emosional siswa.

Responden ketiga menyatakan bahwa selain memberikan pemahaman kepada siswa, mereka juga harus diajarkan tentang bagaimana melaporkan perilaku mencurigakan. Siswa perlu tahu langkah-langkah yang harus diambil jika mereka merasa tidak aman atau mengalami perilaku yang tidak pantas. Dengan memberikan pendidikan yang jelas dan mudah diakses tentang bagaimana melaporkan kejadian-kejadian tersebut, sekolah dapat lebih cepat mendeteksi dan menanggulangi praktik grooming.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang hak-hak siswa adalah landasan penting untuk mencegah terjadinya grooming. Pihak sekolah perlu memastikan bahwa siswa tidak hanya tahu apa yang menjadi hak mereka, tetapi juga merasa bahwa mereka memiliki ruang yang aman untuk berbicara dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Ini menciptakan sebuah sistem perlindungan yang kuat, yang dapat mencegah terjadinya eksploitasi di lingkungan sekolah.

4. Efektivitas Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Anak di Sekolah

Dalam Undang-Undang, telah diatur bahwa setiap anak berhak menerima pendidikan, termasuk dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat 1 huruf (a) menyatakan “Bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didalam satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan juga kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya” (Novianti & Sahrul, 2020).

Kebijakan dan prosedur perlindungan anak di sekolah merupakan salah satu elemen kunci dalam mencegah *Child Grooming*. Responden pertama menunjukkan bahwa meskipun banyak sekolah sudah memiliki kebijakan terkait perlindungan anak, seperti kode etik guru dan peran guru BK, implementasi kebijakan tersebut masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang tidak konsisten dan kurangnya pemahaman di kalangan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Sebagai contoh, meskipun ada prosedur pelaporan, masih banyak siswa yang merasa takut atau tidak tahu harus mengadu kepada siapa.

Responden kedua berpendapat bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif, karena banyak siswa yang merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Ia mengusulkan agar kebijakan perlindungan anak dibuat lebih terpusat, yang melibatkan kementerian pendidikan dan lembaga terkait lainnya. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terintegrasi, diharapkan semua sekolah dapat memiliki pedoman yang sama dalam menangani kasus-kasus *Child Grooming*.

Responden ketiga percaya bahwa kebijakan perlindungan anak akan lebih efektif jika dirancang dengan baik dan ditegakkan dengan konsisten. Selain itu, budaya sekolah yang proaktif dalam melindungi siswa juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan benar. Hal ini berarti bahwa tidak hanya guru, tetapi juga seluruh civitas akademika harus dilibatkan dalam upaya pencegahan grooming, mulai dari pengawasan yang ketat hingga pembentukan iklim sekolah yang aman dan mendukung.

Dengan demikian, meskipun ada kebijakan perlindungan yang sudah diterapkan, tantangan terbesar adalah memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efektif. Dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak di sekolah untuk memastikan bahwa sistem perlindungan anak berjalan dengan baik. Hal ini mencakup pelatihan berkelanjutan untuk guru dan staf, serta pembinaan terhadap siswa mengenai pentingnya melaporkan tindakan yang mencurigakan.

Perlunya evaluasi dan perbaikan kebijakan perlindungan anak ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan sekolah yang aman. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pelaksanaan prosedur yang jelas, dan peningkatan kesadaran di kalangan semua pihak, sekolah dapat menjadi tempat yang lebih aman bagi siswa, serta mengurangi risiko terjadinya *Child Grooming*.

5. Peran Etika Profesi Pendidikan Dalam Mencegah *Child Grooming*

Etika Profesi merupakan sekumpulan prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan bidang keprofesionalannya (Nasruddin, dkk. 2024). Etika profesi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya *Child Grooming* di sekolah. Sebagai seorang pendidik, guru harus memahami batasan dalam berinteraksi dengan siswa dan selalu menjaga profesionalisme dalam setiap hubungan yang terbentuk. Responden pertama menegaskan bahwa etika profesi menjadi benteng utama yang mencegah terjadinya

praktik grooming. Dengan pemahaman etika yang kuat, guru akan selalu berada di jalur yang benar dan tidak akan membiarkan hubungan dengan siswa berkembang menjadi hubungan yang tidak wajar.

Selain itu, pemahaman etika profesi juga melibatkan seleksi yang ketat terhadap calon pendidik. Responden kedua menambahkan bahwa dalam rangka memastikan bahwa para pendidik memiliki integritas dan etika yang baik, proses seleksi harus diperhatikan dengan seksama. Dalam proses ini, tidak hanya kemampuan akademis yang dinilai, tetapi juga karakter dan moralitas calon pendidik untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang.

Responden ketiga menyatakan bahwa dengan adanya standar etika profesi yang jelas, para pendidik dapat menghindari perbuatan yang bisa merusak hubungan mereka dengan siswa. Salah satu langkah pencegahan adalah dengan adanya pembatasan interaksi antara guru dan siswa, seperti batasan dalam komunikasi pribadi atau kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hubungan antara guru dan siswa tetap profesional dan tidak terjebak dalam dinamika yang bisa dimanfaatkan untuk grooming.

Pelatihan mengenai etika dan perlindungan anak sangat penting untuk calon guru, agar mereka lebih menyadari tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas hubungan mereka dengan siswa. Responden ketiga juga mengusulkan bahwa selain pelatihan etika, penting untuk memberikan pendidikan yang mendalam tentang *Child Grooming* dan bagaimana mengenali tanda-tandanya. Dengan demikian, calon pendidik dapat lebih peka terhadap potensi penyalahgunaan hubungan mereka dengan siswa.

Secara keseluruhan, etika profesi pendidikan berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik untuk menjaga hubungan yang sehat dan profesional dengan siswa. Dengan penanaman nilai-nilai etika yang kuat, diharapkan praktik grooming dapat dicegah sejak dini, dan lingkungan pendidikan dapat tetap menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi setiap siswa.

KESIMPULAN

Child Grooming di sekolah merupakan fenomena yang sangat berbahaya dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan. Pemahaman tentang grooming sebagai tindakan manipulatif yang bertujuan untuk mengeksploitasi anak secara seksual atau psikologis sangat penting agar dapat mengidentifikasi potensi risiko di lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya grooming antara lain adalah kurangnya pengawasan, relasi kekuasaan yang tidak sehat antara guru dan siswa, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak siswa. Untuk itu, pendidikan mengenai hak-hak anak dan perlindungan yang tepat di sekolah perlu diperkuat.

Selain itu, kebijakan perlindungan anak dan etika profesi pendidikan memegang peran penting dalam mencegah grooming. Meskipun banyak sekolah yang sudah memiliki kebijakan perlindungan, implementasinya masih kurang maksimal. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, pelatihan etika profesi bagi pendidik, serta kesadaran yang lebih tinggi tentang bahaya grooming sangat penting. Dengan kebijakan yang lebih terintegrasi, serta peran aktif semua pihak di sekolah, lingkungan pendidikan dapat menjadi lebih aman dan mendukung bagi siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hawa, E., Amelia, F.L., Rizky, A.S., Mufidah, N.L., Mukhson, M.A., Jazuli, M.I., Aziz, F. (2020). *The Role of Information Technology Education in Preventing Child Grooming on Social Media: Peran Pendidikan Teknologi Informasi dalam Mencegah Child Grooming di Media Sosial*. Journal Proceedings of The ICECRS, Vol. 8.
- Mulyana, Y. (2023). *Kejahatan Seksual Daring Terhadap Anak Dengan Modus Operandi Melalui Media Game "Online" di Kabupaten Garut*. Community Development Journal, 4(3), 5478-5487.
- Nasruddin. Umalihayati. dkk. (2024). *Etika Profesi Pendidikan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Novianti, R., Sahrul, M. (2020). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1)*. Journal of Social Work and Social Service, 1(2), 139-147.
- Pujayanti, L. P. V. A., & Sulaiman, H. (2023). *Legal Review of Child Grooming as A Crime of Sexual Violence in Indonesia*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(03), 188–196.
- Tualeka, M.W.N. (2017). *Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern*. Jurnal Al-Hikmah, 3(1), 32-48.
- Waruwu, M. (2023). *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 2896-2910.
- Zulfikar, F. (2024). *FSGI Rilis Data Kekerasan di Sekolah, Banyak Kekerasan Seksual yang Pelakunya Guru*. Detik.com. Tersedia di: <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7453288/fsgi-rilis-data-kekerasan-di-sekolah-banyak-kekerasan-seksual-yang-pelakunya-guru>, diakses tanggal 27 Februari 2025.